

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TRAFFICKING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum UNAND



OLEH

BRIMA LEO ERLANGGA

1310111152

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)

DOSEN PEMBIMBING :

1. Dr. Mardenis, S.H.,Msi

2. Zimtya Zora, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *TRAFFICKING* BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

(Brima Leo Erlangga, 1310111152, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman, 2017)

ABSTRAK

Anak merupakan ciptaan Tuhan yang harus di jaga dan dilindungi. anak memiliki hak – hak diantaranya hak untuk hidup bebas, dan non diskriminasi. Setiap anak tidak dibenarkan untuk mendapatkan kejahatan berupa apapun terutama perdagangan manusia, dimana anak di perdagangkan dan dipekerjakan secara tidak layak. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Hukum Nasional Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban trafficking berdasarkan hukum internasional dan untuk mengetahui bagaimana implementasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak korban trafficking menurut hukum nasional Indonesia. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka perlu metode yang berfungsi sebagai pedoman. Sifat penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan – bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori - teori hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan setiap peraturan Internasional maupun Nasional sangat tegas menekankan pelarangan, pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak. Dan Indonesia sudah menciptakan peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan hukum Internasional. Akan tetapi sangat diperlukan peran pemerintah agar permasalahan perdagangan anak ini berkurang, yaitu diantaranya dengan cara mengadakan sosialisasi ke daerah – daerah terpencil mengenai perdagangan manusia dan menempatkan KPAI diseluruh kota yang ada di Indonesia.

ABSTRAK

Children is a creation of god that must be maintained and protected. Children has rights, including rights to live freely and rights of non-discrimination. Every children is not justified to be the victim from any kind of crimes especially human trafficking, which the children are traded and employed unworthly. Based on the issues above, the writer is interested to write a thesis about “Legal Protection Against The Child Victims of Trafficking based on International Law and The Implementation of National Law”. The research purposes to find out the regulation of legal protection against the child victims of trafficking based on international law and to find out about the implementation of legal protection effort by the government against the child victims of trafficking based on Indonesian national law. The character of the research is juridical normative which means reserach by secondary data such as primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research approach is descriptive analysis, which reveal the positive law that related to legal theories which is become into the object of the research. According to the result of the research entirely, every international and national regulations emphasize the prohibition, eradication of human trafficking especially the child. Indonesia has created acts in accordance with International Law. However, the role of government is really needed to decrease trafficking of child, which are conducting socialisation to isolated areas about human trafficking and placing KPAI to every city in Indonesia.

